

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Kamis 13 Februari 2025
Wilayah	Kota Makassar



6 Bulan Tunjangan Sertifikasi 278 Guru Belum Dibayar

BANTUAN SUSU - Pemberian bantuan susu dan vitamin bagi ibu hamil oleh BKKBN Sulsel dan Baznas di Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar, Rabu (12/2/2025).



TRIBUN TIMUR/SITI AMINAH

6 Bulan Tunjangan Sertifikasi 278 Guru Belum Dibayar

MAKASSAR, TRIBUN

- Aliansi Guru Sertifikasi Makassar menggelar unjuk rasa di depan Balai kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Rabu (12/2). Mereka juga melakukan pawai dan konvoi sepeda motor.

- Pantauan Tribun Timur, para guru membawa spanduk dan umbul-umbul yang bertuliskan protes terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi yang belum diterima.

- Para guru tersebut kecewa karena tunjangan sertifikasi mereka belum dibayar selama enam bulan, yakni periode Juli-Desember 2024. Pawai ini dipimpin oleh Ketua Aliansi Guru Sertifikasi, Wajar Natsir DG Sanggu.

"Pembayaran sertifikasi guru memiliki alokasi khusus dari pemerintah pusat. Pencairannya lewat Kementerian yang kemudian di-

transfer ke kas daerah untuk disalurkan ke rekening guru. Jika dana sertifikasi tidak tersampaikan tepat waktu, ada apa?" keluhnya.

Dia menambahkan, sebanyak 278 guru di Kota Makassar, baik dari SD maupun SMP, belum menerima tunjangan sertifikasinya.

Mengenai hal ini Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Andi Ardiansyah Yusran mengatakan, pihaknya tak bisa melakukan pembayaran secara serta-merta. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus melalui mekanisme atau prosedur yang berlaku.

"Untuk menggunakan anggaran negara itu ada alur-alur yang harus dilakukannya. Tentu dengan tuntutan teman-teman ini untuk segera dicairkan kami juga maunya seperti itu," ucap Ardiansyah.

Masalah ini muncul karena terlambatnya penerbitan surat keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan. Sementara SK tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk memberikan transfer kepada pemerintah daerah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba, menyampaikan, masalah ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan juga melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.

"Ada keterlambatan dalam validasi data guru, sehingga SK dari Kementerian Pendidikan pun terlambat terbit. Tanpa SK itu, Kementerian Keuangan tidak bisa mentransfer dana ke daerah," jelas Nielma. Kendati begitu, Nielma memastikan bahwa uang itu tetap menjadi hak guru dan pasti akan dibayarkan. (ami)